



Analisis Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam: Konsep, Tujuan, dan Implementasi

Desiana Laulia Pratii¹, Damai Yanur Ardatus Sholikhah², Safara Ainun Nafisa³,
Ummul Mu'minah Khairina⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: liadesi909@gmail.com¹, damaiyanur70@gmail.com², safaraainun9@gmail.com³,
ummulkhairina12@gmail.com⁴, amalianoeril@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received June 15, 2026

Revised June 16, 2026

Accepted June 18, 2026

Keywords:

Islamic Macroeconomics,
Falah, ZISAF, Sharia Fiscal
Policy, Income Distribution

ABSTRACT

Macroeconomics plays an important role in maintaining economic stability through inflation control, unemployment reduction, and equitable income distribution. However, conventional economic systems that rely on free-market mechanisms and interest-based instruments often face various challenges, including economic inequality, poverty, and financial crises. This study aims to analyze the concepts, objectives, implementation, and challenges of macroeconomics from an Islamic perspective. The research employs a qualitative approach using the library research method by reviewing relevant literature sources. The findings indicate that Islamic macroeconomics is founded upon the principles of tawhid (monotheism), justice ('adl), balance (ta'azun), and responsible freedom. The primary objective of Islamic macroeconomics is to achieve falah (well-being in this world and the hereafter) through equitable economic growth, poverty alleviation, fair income distribution, and economic stability. Its implementation is reflected in the utilization of zakat, infaq, sadaqah, aqf (ZISAF), Sharia-based fiscal policies, a riba-free financial system, the development of Islamic banking, sukuk, and profit-sharing financing schemes. Although Islamic macroeconomics has significant potential to promote social welfare and economic justice, its implementation continues to face challenges, including the dominance of conventional economic systems, limited Islamic economic literacy, inadequate human resources, and regulatory constraints. Therefore, strengthening regulations, enhancing public education, fostering innovation in Islamic financial instruments, and utilizing digital technology are essential to support the sustainable development of Islamic macroeconomics.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

ABSTRACT



Article history:

Received June 15, 2026

Revised June 16, 2026

Accepted June 18, 2026

Kata Kunci:

Ekonomi Makro Islam, Falah, ZISAF, Kebijakan Fiskal Syariah, Distribusi Pendapatan

Ekonomi makro berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, dan pemerataan distribusi pendapatan. Namun, sistem ekonomi konvensional yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas dan instrumen bunga sering menghadapi berbagai permasalahan seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan krisis keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, tujuan, implementasi, serta tantangan ekonomi makro dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research melalui pengkajian berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi makro Islam dibangun atas prinsip tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (taazun), dan kebebasan yang bertanggung jawab. Tujuan utama ekonomi makro Islam adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Implementasinya diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, akaf (ZISAF), kebijakan fiskal berbasis syariah, sistem keuangan tanpa riba, pengembangan perbankan syariah, sukuk, serta pembiayaan berbasis bagi hasil. Meskipun memiliki potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, penerapan ekonomi makro Islam masih menghadapi tantangan berupa dominasi sistem ekonomi konvensional, rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan regulasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, inovasi instrumen keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan ekonomi makro Islam yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Desiana Laulia Pratii

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: liadesi909@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi makro berperan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian negara melalui pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, serta menjaga keseimbangan distribusi pendapatan masyarakat. Stabilitas ekonomi yang baik akan mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada perekonomian global abad ke-21 telah menghadapi berbagai permasalahan struktural yang semakin kompleks. Seperti, Inflasi yang tidak terkendali, tingkat pengangguran yang tinggi, ketimpangan distribusi pendapatan, serta krisis keuangan yang berulang, hal ini dikarenakan fenomena yang kerap terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Sistem ini, yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas dan instrumen riba (bunga), dinilai oleh banyak kalangan yang telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan Masyarakat. Isu



ketimpangan distribusi pendapatan menjadi salah satu permasalahan paling mendasar dalam ekonomi makro modern. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin terus melebar di berbagai negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di Indonesia sendiri, Koefisien Gini masih berada pada level yang mengindikasikan ketimpangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan ekonomi alternatif yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh (Chapra, 2001).

Umumnya dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat menerapkan system ekonomi konvensional dan ekonomi islam, pada ke dua system ini terdapat perbedaan dalam sistemnya yakni terletak pada prinsip dan mekanismenya. Ekonomi konvensional cenderung berfokus pada kebebasan pasar, pertumbuhan ekonomi, dan maksimalisasi keuntungan individu sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, mekanisme pasar diberikan peran yang sangat besar dalam menentukan harga, produksi, distribusi, serta aktivitas ekonomi lainnya dengan campur tangan pemerintah yang relatif terbatas. Keberhasilan ekonomi biasanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, keuntungan perusahaan, dan peningkatan pendapatan nasional. Selain itu, sistem ekonomi konvensional umumnya menggunakan mekanisme bunga (riba) dalam aktivitas keuangan, seperti pinjaman, kredit, maupun investasi perbankan. Penggunaan bunga dianggap sebagai instrumen penting dalam mendorong perputaran modal dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya sistem ini sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesenjangan sosial, penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, persaingan ekonomi yang tidak sehat, serta ketidakstabilan ekonomi akibat spekulasi dan krisis keuangan. Oleh karena itu, banyak pihak menilai bahwa sistem ekonomi konvensional masih memiliki kelemahan dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan pendekatan ekonomi islam tidak hanya berbicara tentang mekanisme pasar, tetapi juga menyentuh dimensi moral, spiritual, dan sosial dari aktivitas ekonomi. Instrumen-instrumen ekonomi makro Islam seperti zakat, infak, sedekah, akaf (*ZISAF*), kebijakan fiskal berbasis syariah, dan sistem keuangan tanpa riba diyakini mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada. Namun demikian, implementasi ekonomi makro Islam dalam tataran praktis masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dominasi sistem ekonomi konvensional secara global hingga keterbatasan regulasi dan institusi pendukung (Karim, 2007).

Nilai-nilai Islam memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi karena menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, seimbang, dan sejahtera. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan diterapkan melalui pembagian hak dan kewajiban secara proporsional serta larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, seperti riba, penipuan, dan monopoli. Selain itu, prinsip keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta antara aspek material dan spiritual. (Azizah, 2021). Dengan adanya keseimbangan tersebut, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan sosial. Adapun tujuan utama ekonomi Islam adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (*Falah*), yaitu kesejahteraan yang tidak hanya dirasakan dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan dan keberkahan hidup. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi dapat



menjadi solusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial di Masyarakat (Muhamad,2020).

Untuk kehidupan ekonomi modern, permasalahan ekonomi makro yang sering terjadi meliputi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara terus-menerus sehingga daya beli masyarakat menurun. Pengangguran terjadi ketika jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga sebagian masyarakat tidak memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Sementara itu, ketimpangan distribusi pendapatan adalah keadaan ketika pembagian pendapatan dalam masyarakat tidak merata, di mana sebagian kecil masyarakat memperoleh pendapatan yang sangat besar sedangkan sebagian lainnya masih berada pada tingkat ekonomi rendah. data dari BPS menunjukkan bahwa koefisien gini Indonesia meningkat cukup pesat dari 0,385 di sekitar tahun 2020 menjadi 0.363 di tahun 2025.

Tabel 1. Tren Koefisien Gini Indonesia (2020-2025)

Tahun	Rasio Gini (nasional)	Keterangan
2020	0,385	Meningkat akibat dampak aal pandemi covid-19
2021	0,384	Masih berada di level tinggi selama masa pemulihan
2022	0,381	Mulai menunjukkan trend penurunan bertahap
2023	0,388	Sempat fluktuasi naik (tertinggi sejak 2019)
2024	0,379	Penurunan Kembali ke level sebelum 2023
2025	0,363	Mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam beberapa tahun terakhir

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah penulis

Semakin tinggi koefisien gini, semakin tinggi juga kesenjangan. Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), ketimpangan ekonomi ini disebabkan karena distribusi pendapatan yang kurang setara, ketimpangan dari segi peluang dan kesempatan dari sejak lahir, serta faktor eksternal lainnya, seperti banyak nya pengangguran dan kemiskinan, daya beli rendah pada inflasi, kualitas pada pertumbuhan ekonomi tidak stabil, kelemahan daya saing pada pembeli, permasalahan ekonomi ekspor dan impor, inflasi terjadi secara berturut-turut, kemampuan pajak rendah, peningkatan rasio utang, kredit macet dalam perbankan, serta permasalahan ekonomi krisis nilai tukar. semua masalah tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat serta kestabilan perekonomian suatu negara.

Ekonomi makro Islam relevan sebagai alternatif solusi dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan karena menekankan prinsip keadilan dan pemerataan kesejahteraan.



Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan penumpukan harta, ekonomi Islam berupaya mendistribusikan kekayaan secara lebih merata kepada masyarakat. Selain itu, larangan riba juga bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi yang dapat memperlebar kesenjangan sosial. Dengan demikian, ekonomi makro Islam dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tiga hal utama: (1) bagaimana konsep ekonomi makro dalam perspektif Islam; (2) apa saja tujuan yang hendak dicapai oleh ekonomi makro Islam; dan (3) bagaimana implementasi ekonomi makro Islam dalam sistem ekonomi kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

LANDASAN TEORI

A. Konsep Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan, mencakup variabel-variabel agregat seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan kebijakan fiskal serta moneter. Indikator-indikator utama ekonomi makro meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, dan nilai tukar mata uang (Mankiw, 2013).

Dalam kerangka ekonomi konvensional, terdapat dua pendekatan kebijakan utama untuk mengelola perekonomian: kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sementara kebijakan moneter berkaitan dengan pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga oleh bank sentral. Kedua instrumen ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat inflasi yang rendah, dan tingkat pengangguran yang minimal (Huda, 2008).

B. Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya dengan alat-alat yang langka berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam (Chapra, 2001). Definisi ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekedar ekonomi konvensional yang disebut “syariah”, melainkan sebuah sistem yang memiliki landasan epistemologi dan nilai yang berbeda secara fundamental. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mencakup: pertama, tauhid, yang menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya alam sehingga manusia hanya berperan sebagai khalifah (pengelola); kedua, keadilan (*‘adl*), yang menuntut distribusi sumber daya dan hasil ekonomi secara proporsional dan tidak eksploitatif; ketiga, keseimbangan (*taazun*), yang menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat; dan keempat, kebebasan yang bertanggung jawab, di mana kebebasan ekonomi diakui namun dibatasi oleh hukum syariah (Karim, 2007). Selain itu, Islam secara tegas melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian) dalam setiap transaksi ekonomi. Peran negara dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi



konvensional. Negara bukan hanya pengatur mekanisme pasar, tetapi juga berkeajiban untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warga negara, menegakkan keadilan dalam distribusi kekayaan, dan mencegah monopoli serta penimbunan harta (Mannan, 1993).

C. Tujuan Ekonomi Makro Islam

Tujuan ekonomi makro Islam adalah menciptakan kesejahteraan hidup atau *falāh*. Yaitu dalam aspek duniawi yang meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, kebebasan dari kemiskinan, serta distribusi pendapatan yang merata. Sementara itu, Adapun dalam aspek dimensi ukhrai yang mencakup orientasi pada nilai-nilai ilahiah dalam setiap aktivitas ekonomi (P3EI, 2014). Secara operasional, tujuan ekonomi makro Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: Secara umum menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu tujuan dari ekonomi makro Islam yakni dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial serta mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan juga mencapai stabilitas harga tanpa eksploitasi. Dan mendorong aktivitas ekonomi yang halal dan produktif.

D. Instrumen Ekonomi Makro Islam

Zakat merupakan instrumen utama dalam filantropi Islam yang bersifat ajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga sistem sosial yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Infak merupakan bagian penting dari filantropi Islam yang bersifat sunnah dan fleksibel. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan tertentu, infak dapat dilakukan kapan saja dan dalam jumlah berapa pun sesuai kemampuan. *akaf* merupakan instrumen filantropi Islam yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan meakafkan harta, seorang muslim memberikan manfaat yang terus mengalir meskipun ia telah afat.

Kebijakan fiskal berbasis syari'ah bertumpu pada pemanfaatan sumber-sumber keuangan publik yang halal dan adil, seperti zakat, *kharaj*, *ghanimah* dan penguatan syari'ah lainnya. Dalam konteks modern, pengeluaran negara harus diarahkan pada pengentasan kemiskinan, penguatan sektor riil, dan pembiayaan proyek-proyek publik yang berorientasi maslahat. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menghindari definisi struktural dalam utang berbasis bunga (*riba*), serta menekankan efisiensi penggunaan APBN dengan prinsip amanah dan akuntabilitas (Hadi, 2025).

Sistem keuangan tanpa *riba* dalam ekonomi syariah menekankan transaksi yang halal, adil, dan transparan. Pemahaman masyarakat tentang larangan *riba*, akad syariah, dan muamalah halal penting agar mampu membedakan transaksi halal dan non-halal serta lebih bijak dalam memilih pembiayaan. Literasi keuangan syariah juga membantu pengelolaan usaha mikro melalui pencatatan transaksi, pengaturan modal, dan perencanaan keuangan. Penerapan sistem tanpa *riba* dilakukan melalui akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *qardhul hasan* yang menjadi alternatif pembiayaan tanpa bunga. (Azizah, 2026). Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengembangkan usaha secara



lebih aman, disiplin mengelola keuangan, serta membangun kemandirian finansial yang berorientasi jangka panjang sesuai nilai-nilai syariah.

Baitul Mal sebagai lembaga keuangan Islam yang mulai berkembang sejak masa Rasulullah SA dan Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini berfungsi mengelola harta negara yang berasal dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Dalam ekonomi makro Islam, Baitul Mal berperan menjaga kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran dana untuk fakir miskin, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan fasilitas umum.

I. Metpen: Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (Studi Kepustakaan). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan ekonomi makro dalam perspektif Islam, khususnya mengenai konsep, tujuan, dan implementasinya dalam kehidupan ekonomi masyarakat maupun kebijakan negara (Moleong, 2017).

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, Al-Qur'an, Hadis, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih difokuskan pada pembahasan ekonomi makro Islam, prinsip syariah, kebijakan ekonomi, distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sistem keuangan tanpa riba.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, memahami, dan mengkaji berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan konsep ekonomi makro Islam berdasarkan teori serta pandangan para ahli.

Hasil analisis kemudian digunakan untuk memahami bagaimana tujuan ekonomi makro Islam, seperti terciptanya keadilan, kesejahteraan, stabilitas ekonomi, dan pemerataan distribusi pendapatan, dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembahasan

A. Konsep Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam

Ekonomi makro dalam perspektif Islam merupakan suatu sistem yang tidak hanya membahas persoalan ekonomi secara agregat, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, tujuan utama ekonomi makro Islam tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (*falah*) yang mencakup aspek material dan spiritual (Rahmat, 2023). Konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga dari terciptanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Perbedaan mendasar antara ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional terletak pada tujuan serta instrumen yang digunakan dalam sistem ekonomi. Jurnal tersebut



menjelaskan baha “*the fundamental difference beteen Islamic and conventional macroeconomics lies in the purpose and prohibition of interest in Islam.*” Pernyataan tersebut menegaskan baha ekonomi Islam melarang praktik riba yang selama ini menjadi instrumen penting dalam sistem ekonomi konvensional. Sebagai alternatif, ekonomi Islam mengedepankan sistem bagi hasil dan aktivitas ekonomi yang berbasis sektor riil. Dengan demikian, orientasi ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan individu, tetapi juga pada kemaslahatan bersama serta distribusi kekayaan yang lebih adil.

Selain menekankan aspek ekonomi, ekonomi makro Islam juga mengandung pesan moral dan etika yang kuat. Setiap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Islam, pemerintah tidak hanya berperan menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga memastikan baha kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan kerugian bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan akaf memiliki peran penting dalam mendukung distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang berlandaskan etika diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, konsep ekonomi makro Islam menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi perhatian penting, tetapi seluruh kebijakan tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi makro Islam dapat dipahami sebagai suatu paradigma yang menggabungkan aspek ekonomi dan spiritual dalam satu kesatuan. Paradigma ini menaarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat.

B. Tujuan Ekonomi Makro Islam

Ekonomi islam sebagai suatu sistem prekonomian bertujuan untuk menghantarkan manusia untuk mencapai falah. Tujuan ini dihadirkan oleh pemikir ekonomi islam selaras dengan maqashid syariah, artinya kesejahteraan itu terletak pada perlindungan terhadap agama, keselamatan nyaa manusia, akal, keturunan dan harta benda. Konsep falah sendiri bukanlah sekadar kesejahteraan materi semata, melainkan mencakup kesejahteraan lahir dan batin, duniai dan ukhrai (Zarqa, 1993). Al-Quran dan Hadits menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, menunjukkan baha pencapaian falah membutuhkan usaha untuk mencapai kesuksesan duniai yang di ridhoi Allah ST. serta menjalankan keajiban agama dan berbuat baik kepada sesama. arna, mereka melihat zakat, akaf, dan berbagai mekanisme redistribusi lainnya sebagai instrumen penting untuk mencapai keadilan tersebut. Dengan ini, sistem moneter Islam menolak praktik riba dan spekulasi berlebihan yang sering menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi (Hasibuan, 2025).

Selain menjaga kesetabilan ekonomi, Uang dalam perspektif Islam dipandang sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk



memperoleh keuntungan tanpa aktivitas produktif. Kebijakan moneter Islam diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, mendorong sektor riil, dan memastikan keadilan dalam sistem keuangan. Instrumen moneter syariah seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan pengendalian likuiditas yang etis menjadi ciri khas sistem ini. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi makro Islam diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak krisis dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan akaf. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan yang efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam konteks makroekonomi, hal ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Muhamad, 2026). Sistem ekonomi Islam diyakini dapat menjadi jawaban atas permasalahan perekonomian dan menaarkan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, dengan tujuan mencapai falah kaffah tanpa melakukan aktivitas ekonomi yang melanggar ketentuan Islam.

C. Implementasi Ekonomi Makro Islam

Implementasi ekonomi makro Islam dalam sistem ekonomi kontemporer dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, penerapan sistem keuangan syariah yang telah berkembang pesat secara global. Perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah kini menjadi bagian integral dari sistem keuangan global. Data Islamic Financial Services Board (IFSB) menunjukkan bahwa aset keuangan syariah global telah mencapai triliunan dolar AS, mencerminkan besarnya potensi dan penerimaan terhadap sistem keuangan Islam.

Selain melalui sektor keuangan, implementasi ekonomi makro Islam juga tercermin dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Oleh karena itu, optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat dapat menjadi sarana yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Sejalan dengan hal tersebut, (Beik dan Arsyianti, 2016). menegaskan bahwa integrasi zakat ke dalam sistem fiskal nasional merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam prinsip ekonomi makro Islam juga diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan sosial. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui pengeluaran publik, pemberian subsidi yang tepat sasaran, serta pengelolaan utang negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pengembangan sukuk atau obligasi syariah menjadi salah satu inovasi penting dalam pembiayaan negara. Sukuk telah digunakan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai instrumen untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan



berbagai program strategis tanpa bergantung pada mekanisme berbasis bunga yang dilarang dalam Islam.

Selain itu implementasi ekonomi makro Islam juga tampak pada upaya pengembangan sektor riil melalui pembiayaan berbasis kemitraan, seperti mudharabah dan musyarakah. Skema pembiayaan ini mendorong kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan sistem bagi hasil yang adil. Berbeda dengan sistem kredit konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah mendistribusikan risiko dan keuntungan secara proporsional kepada setiap pihak yang terlibat. Dengan demikian, model pembiayaan tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha produktif, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berkeadilan. Keseluruhan aspek tersebut menunjukkan bahwa ekonomi makro Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjaab berbagai tantangan ekonomi kontemporer sekaligus menaarkan alternatif sistem ekonomi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan social (Misanan,2023).

D. Tantangan Implementasi

Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia Dalam upaya mengimplemetasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia, bagaimanapun, akan dihadapkan pada pelbagai tantangan. Bila diclaborasi, maka tantangan tersebut dapat dipilah kepada beberapa bentuk tantangan.Pertama, kondisi politik. Tantangan kondisi politik berkaitan dengan keenangan eksekutif dan legislatif dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Sebab, bagaimanapun, implementasi ekonomi syariah di Indonesia akan berkaitan dengan masalah kebijakan dan tegulasi, sementara kebijakan dan regulasi sangat membutuhkan kedua institusi tersebut.

Menurut (Chapra, 2000). pada umumnya kondisi politik yang terjadi di negara-negara Muslim deasa ini tidak cukup kondusif dan bahkan menjadi tembok penghalang bagi realisasi ekonomi syariah. Keadaan seperti ini tampaknya terjadi pula di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini muncul, barangkali salah satu penyebabnya, karena para politisi yang tampil ke penras politik lebih didominasi oleh para "nasionalis" atau "abangan" yang tidak memiliki concern terhadap pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia.

Sehubungan dengan itu, maka reformasi politik di negara-negara Muslim ini perlu untuk segera dilakukan. Pada gilirannya keadaan politik ini lebih berpihak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah. Molornya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlrankan Syariah menjali Undang-Undang Syariah bisa jadi merupakan salah satu bukti baha political vill dari legislatif untuk Perubahan iklim politik ekonomi ini hendaknya dilakukan secara gradual atau bahkan kultural. Atau, menurut istilah Umer Chapra, reformasi politik ini hendaknya dilakukan secara damai dan mengedepankan Islam sebagai nahmah li al-'alamin (Chapra, 2000).

Kedua, kondisi sosiologis. Tantangan kondisi sosiologis ini berkaitan dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi syariah untuk diimplementasikan. Hal ini muncul disebabkan karena. sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional. Bahkan, tidak sedikit umat Islam yang sangat



memuja sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Barat," Deislamisasi yang telah berlangsung berabad-abad ini ternyata telah menyebabkan kerangka pemikiran umat Islam menjadi stagnan dan apriori terhadap konsepsi ekonomi syariah. Atas dasar itulah, maka menurut (Chapra, 2000). tugas ilmu ekonomi syariah itu lebih luas dan jauh lebih sulit daripada ilmu ekonomi konvensional. Keadaan seperti ini kemudian berimplikasi pada lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam akan ekonomi syariah. Bagaimana mungkin umat Islam itu dapat merealisasikan ekonomi syariah, bila pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu juga masih lemah. Oleh karena itu, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia.

Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Keadaan seperti ini merupakan implikasi dari upaya sistematis penjajah Belanda untuk menterbelakangkan bangsa Indonesia. Dari mulai keterbatasan menuntut ilmu sampai pada pemberlakuan hukum secara diskriminatif telah menjadikan kehidupan sosial-ekonomi bangsa Indonesia terbelakang dan dampaknya masih terasa. hingga saat ini. Tampaknya setelah krisis moneter 1998 sampai saat ini perekonomian Indonesia belum juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan, angka kemiskinan semakin hari semakin meningkat, yang secara ekonomis tidak memungkinkan untuk melakukan investasi.

Selaras dengan itu, saat ini ekonomi syariah lebih banyak diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, sehingga sulit untuk dialokasikan untuk investasi. Padahal, sebagaimana dimaklumi baha deasa ini, implementasi ekonomi syariah di Indonesia banyak berbentuk lembaga keuangan syariah. Sementara pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah, antara lain, sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, rerurama dalam menginvestasikan dananya. Kalau ternyata, kemampuan masyarakat untuk berinvestasi itu lemah, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut.

E. Strategi Penguatan

Strategi penguatan ekonomi makro dalam perspektif Islam dapat dilakukan melalui optimalisasi kebijakan fiskal dan moneter yang berlandaskan prinsip syariah. Menurut (Putri dkk, 2025). kebijakan fiskal Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan akaf memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan serta memperbaiki distribusi pendapatan. Melalui pengelolaan yang efektif, instrumen-instrumen tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Selain kebijakan fiskal, penguatan ekonomi makro Islam juga memerlukan dukungan kebijakan moneter yang bebas dari praktik riba. Sistem moneter Islam menekankan penggunaan instrumen keuangan yang berbasis sektor riil dan mekanisme bagi hasil. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih adil. Pengembangan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk



dan pembiayaan berbasis kemitraan, dapat menjadi alternatif sumber pendanaan pembangunan tanpa menimbulkan ketergantungan pada sistem bunga.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah membangun sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter Islam. Sinergi tersebut memungkinkan terciptanya koordinasi yang lebih baik dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Dalam penelitiannya, Putri dkk. menyatakan baha “the synergy beteen Islamic fiscal and monetary policies provides an effective and practical strategy to accelerate SDG achievement because it offers an economic frameork that is equitable, inclusive, stable, and oriented toard community empowerment and long-term sustainability.” Pernyataan tersebut menunjukkan baha kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter Islam mampu menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, perkembangan teknologi digital juga dapat mendukung penguatan ekonomi makro Islam. Digitalisasi layanan keuangan syariah, pengembangan fintech syariah, serta tata kelola yang transparan dapat memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi syariah. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah menjadi lebih mudah sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif. Oleh karena itu, penguatan ekonomi makro Islam tidak hanya bergantung pada instrumen fiskal dan moneter, tetapi juga pada kemampuan memanfaatkan inovasi teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Ekonomi makro islam perspektif Islam merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariah seperti tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (taazun), dan tanggung jaab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berfokus pada mekanisme pasar dan penggunaan bunga, ekonomi makro Islam menekankan sistem keuangan tanpa riba, distribusi kekayaan yang adil, serta pencapaian kemaslahatan bersama.

Tujuan utama ekonomi makro Islam adalah meujudkan falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual, duniai dan ukhrai. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilitas harga, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang halal dan produktif.

Implementasi ekonomi makro Islam dapat dilakukan melalui pengembangan sistem keuangan syariah, optimalisasi instrumen ZISAF (zakat, infak, sedekah, dan akaf), penerapan kebijakan fiskal berbasis syariah, penggunaan sukuk sebagai instrumen pembiayaan negara, serta pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Berbagai instrumen tersebut berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berkeadilan.

Meskipun demikian, penerapan ekonomi makro Islam masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain dominasi sistem ekonomi konvensional, rendahnya literasi ekonomi



syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi dan literasi masyarakat, pengembangan inovasi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital agar ekonomi makro Islam dapat berkontribusi lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, M. (2021). Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2), 153-156.
- Azizah, Hanum. (2026). Implementasi Ekonomi Syariah Tanpa Riba Sebagai Model Strategi Masyarakat Nagori Senio Membangun Kemandirian Finansial. *Jurnal Ilmu Manajemen Ekonomi dan Keirusahaan*, 6(1), 250.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomisasi Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1), 1–18.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Gini Rasio September 2025 tercatat 0,363. Diakses dari bps.go.id
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2008). Investasi pada Pasar Modal Syariah: Teori dan Praktik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 22–40.
- Hasibuan, A. D. (2025). Falah Sebagai Tujuan Akhir Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2 (1), 529.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 7(2), 11-34.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. (2020). *Makroekonomi Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020.
- Mannan, M. A. (1993). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mankiw, N. G. (2013). *Macroeconomics* (8th ed.). Worth Publishers.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Misanan, Munrokhim. (2023). General Equilibrium Model of Islamic Macroeconomic Framework Tracing Through Zakat, Profit Share, and Producers' Maslahah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(2), 286–310.
- Muhamad. F. A. N. (2026). Kosep Ekonomi Makro Islam Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Dan Berkelanjutan Nasional Berbasis Syariah Maximal. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan*, 3 (3), 68-71.
- P3EI Universitas Islam Indonesia. (2014). *Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Putri. R. D. N. (2025). Strategi Dalam Meujudkan Sustainable Development Goals Melalui Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam. *Jurnal Akadamik Ekonomi dan Manajemen*, 2 (4),
- Rahmat dkk. (2023). Islamic Macro Economy: A Ne Paradigm. *International Journal of Economics (IJEK)*, 2 (1), 33–44.
- Janari. Y. (2012). Tantangan Dan Inisiasi Dalam Implementasi Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2 (7), 93-94.



Zarqa, M. A. (1992). Islamic Economics: An Approach to Human Welfare. Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics, 1(1), 33–47.